

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir, M. (2004) *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Didaerah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Alhusain, A. S., Mauleny, A. T., & Sayekti, N. W. (2018). *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ali, A. (2013) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J & Safa'at, A. (2012) *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta,
- Duswara, D, M, (2001) *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Fajar, M dan Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamidi, J. (2011). *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*. Jakarta: Prestasi Pustakarayah.
- Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Ilyas, Wirawan, Burton dan Richard, (2001), *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Moleong, J, (2002), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Remaja.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Mulyadi. (2015). *Implementasi kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Raharjo, B. (2011). *Manajemen lalu lintas*. Jakarta, PT Citra Pustaka Aksara.
- Riwu, K, J. (2010) *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.

- S. Nasution, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), Hal. 106.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada: 2007) Hal. 110.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007),
- Shidarta, (2013) *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Solichin Abdul Wahab, (2005) *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta; Bumi Aksara.
- Sukanto. (1985). *Nafsiologi*, Jakarta: Integritas Press.
- Sunarso, H. S., & SH, M. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Syaodih, N, (2010) *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Umar, H. (1996). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, (2007). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Selemba Empat.
- Koesoemahatmadja, D. H. (1979). *Pengantar Ke Arah Sistim Pemerintahan Daerah Di Indonesia*.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4. Sekretariat Negara. Jakarta Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82. Sekretariat Negara. Jakarta Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 85. Sekretariat Negara. Jakarta Indonesia.
- Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya. Lembaran Daerah Surabaya Tahun 2018 Nomor 3. Sekretariat Daerah. Surabaya.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/Hk.105/Drjd/96.

## JURNAL

Abdillah, T., Arundaya, M. F. L., & Al Amin, M. N. F. (2024). Analisis Problem Tree Pada Kebijakan Pembayaran Parkir Elektronik di Kota Surabaya. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 2(2), 439-452.

Anggraeni, M. A., & Pambudi, A. (2024). Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Melalui Penerapan QRIS dalam Pembayaran Retribusi Parkir di Kota Yogyakarta. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 9(2), 15.

H. A. Ningsih, E. M Sasmita, B. Sari, (2021) “ Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Menggunakan Uang Elektronik ( QRIS ) Pada Mahasiswa”, Jurnal IKRA- ITH Ekonomika, Vol 4 No. 1.

Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1), 13-22.

Mulyata, J. (2015). *Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).

Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130-152.

Oktoviana Banda Saputri (2020), *Preferensi konsumen dalam menggunakan quick response code indonesia standard (Qris) sebagai alat pembayaran digital*. Jakarta, Kinerja 17 (2), 20.

Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81-87.

Saepudin, Juju. (2018). "Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Institut Teknologi Bandung." *Al-Qalam* 24, no. 2: 258-270.

**INTERNET**

Bank Indonesia, Quick Response Code Indonesian Standard <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx#:~:text=3.,%2C%20cepat%2C%20dan%20terjaga%20keamanannya>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2024 pukul 19.30

Hamada Nofita, Putri, Hakikat dan jenis Aliran .Konvensional Tentang Tujuan Hukum, <https://vocasia.id/blog/hakikat-dan-jenis-aliran-konvensional-tentang-tujuan-hukum/>. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2024 pukul 19.30

KBBI. Parkir, diambil dari <https://kbbi.web.id/parkir>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2024 pukul 00.35

**LAIN-LAIN**

Wawancara, Bapak Gusdino, Selaku Staff pengelola data dan informasi UPT Parkir tepi jalan umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya, kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Surabaya, 26 Juni 2025 pukul 10.00 WIB

Wawancara, Bapak Yusuf, selaku Pengawas Parkir TJU Balai Kota Surabaya, Balai Kota Surabaya, Surabaya 21 November 2025 pukul 02.00 WIB

Wawancara Bapak Syaiful, selaku Petugas Parkir TJU Balai Kota Surabaya, Balai Kota Surabaya, Surabaya 21 November 2025 pukul 15.00 WIB